

KATA PENGANTAR

Komunikasi informatika sebagai sarana interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam lingkup pemerintahan kabupaten memegang peran penting dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi. Penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika telah mampu menghubungkan wilayah sebagai satu kesatuan dan mendistribusikan informasi pembangunan ke seluruh wilayah. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan kedepan sejalan dengan perubahan dan dinamika lingkungan strategis, sementara disisi lain transportasi terus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong aktivitas sosial ekonomi ke seluruh pelosok.

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit di Lingkungan Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah urusan komunikasi informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pokok dan komunikasi dan informatika tersebut diselenggarakan dalam rangka mendukung langkah langkah pengembangan pembangunan guna mewujudkan kemajuan disegala bidang melalui kegiatan distribusi barang jasa dan mobilitas manusia ke seluruh pelosok dan inter wilayah kabupaten, serta aktivitas interaksi sosial ekonomi.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Dalam Penyajian ini kami telah berupaya untuk dapat menyusunnya dengan baik dan semaksimal mungkin, namun segala keterbatasan yang dimiliki sehingga mungkin hasil yang dapat di capai belum seperti yang diharapkan.

Atas segala kekurangan tak lupa dimohon maaf dan semoga Rencana Kerja (RENJA) 2025 ini bermanfaat bagi kita semua.

Pangkajene Sidenreng, 21 April 2024

Kepala Dinas,



H. BACHRIAR.Shi.M.Si

Pangkat: Pembina Tk.I
Nip. 19710122 199203 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL..... iv

BAB I PENDAHULUAN

 I.1. Latar Belakang 1

 I.2. Landasan Hukum 2

 I.3. Maksud dan Tujuan..... 3

 I.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

 II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas
 Komunikasi dan Informatika 9

 II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan
 Informatika..... 18

 II.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
 Komunikas dan Informatika.....
 22

 II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 24

 II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 35

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

 III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 37

 III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan
 Informatika..... 38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

 III.3. Program dan Kegiatan..... 42

BAB V PENUTUP..... 54

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang begitu pesat dalam satu dasawarsa terakhir telah membawa implikasi kepada pesatnya pertumbuhan penduduk, tenaga kerja, ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan kegiatan industri, perdagangan dan jasa serta pariwisata yang telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap wilayah sekitarnya. Perkembangan sektor-sektor tersebut merupakan faktor yang dominan mempengaruhi perkembangan sektor perhubungan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang didukung oleh sektor komunikasi dan informatika yang handal.

Penyelenggaraan sektor komunikasi dan informatika di Kabupaten Sidenreng Rappang dipandang perlu untuk melakukan pengaturan/ penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaannya dapat berjalan aman, lancar dan tertib, hal ini sejalan dengan kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014.

Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya memerlukan sebuah kebijakan sebagai petunjuk, penentu arah, sasaran dan tujuan agar pembangunan sektor komunikasi dan informatika dapat dilakukan dengan baik, kebijakan ini dapat diwujudkan dalam sebuah rencana kerja secara proporsional dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Renja yang disusun merupakan hasil analisis dan Evaluasi Program dan Kegiatan yang sangat prioritas untuk Tahun Anggaran 2024.

I.2. Landasan Hukum

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan daerah lebih banyak diletakkan pada kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah beserta masyarakat. Pendelegasian suatu kewenangan penyelenggaraan pemerintah dari pusat ke daerah secara internal akan diikuti pengaturan dalam aspek pembiayaan yang diatur dalam penimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai

penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah memegang peranan penting dan memiliki tugas serta fungsi yang penting pula dalam pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan rakyatnya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen perencanaan taktis – strategis menyebarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan sektor komunikasi dan informatika secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai prioritas dan kebutuhan daerah.

Landasan hukum yang lain yang mengatur penyelenggaraan pemerintah di daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimanatelah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Permendagri No.86/2017 tentang pelaksanaan PP No.8 2008
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang daerah kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Tahun 2025;

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Draft Awal Rencana Kerja sebagai bagian integral dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Penyusunan Rencana Kerja yang efektif dan efisien .

Esensi dari sistem RENJA bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang adalah perwujudan dari implementasi sistem Penyusunan Rencana Kerja Anggaran. Penyusunan Renja Tahun Anggaran 2025 ini tidak lepas dari Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2024 yang diperoleh.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Sebagai acuan Diskominfo dalam rangka untuk terlaksananya RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.
2. Untuk merumuskan program dan kegiatan Diskominfo Kab. Sidrap selama tahun 2025

Dua Tujuan utama RENJA tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) oleh setiap instansi pemerintah.

I.4. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang tahun sebelumnya sebagai tolak ukur Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana Kerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (***Performance Gap***) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut ;

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

I 1. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkasan tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

I.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD

I.4 Sistematika

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPDP

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan rancangan awal RKPDP dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan –temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPDP, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan lampiran

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III. 1 Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

III. 2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

III.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu, indikatif, maupun kombinasi keduanya
- e. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara umum Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidrap Tahun 2023 belum dapat dilaksanakan secara maksimal hal tersebut disebabkan pelaksanaan anggaran 2024 sementara berlangsung, karena itu capaian pelaksanaan renstra SKPD tahun 2024-2026 yang digunakan untuk mereview hasil pelaksanaan renja SKPD.

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Kegiatan review hasil pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan renstra SKPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD tahun berjalan yang baru disahkan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Diskominfo sebagai berikut :

- a. Belum maksimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga jadwal semua tahapan-tahapannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- b. Belum optimalnya koordinasi dan konsolidasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat atau dalam hal ini Kementerian Kominfo dalam urusan kominfo yang menyebabkan kurangnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi urusan komunikasi dan informatika.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Diskominfo dalam pelaksanaannya ada beberapa urusan yaitu urusan komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena adanya kerjasama yang baik antar Instansi. Tim bekerja dengan baik sehingga sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan sampai akhir tahun. Hal tersebut menjadi modal penting Diskominfo Kab. Sidrap dalam menghadapi berbagai macam tugas-tugas berat dan perlu dipertahankan ke depan.

Di samping itu, RENSTRA yang disusun juga ditujukan memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 3 (tiga) tahun mendatang. Bagi manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Renstra dipandang sebagai :

- a. Alat bantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.

- c. Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Renstra sebagai alat bagi manajemen, memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis. Dalam dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappag secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran strategis serta strategi pencapaiannya (Kebijakan dan program).

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu pada

- a) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik kegiatan Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Pelayanan informasi Publik dari rencana anggaran sebesar Rp.102.129.000 dan terealisasi sebesar Rp.43.151.200 dari target kinerja 25 dokumen tapi yang terrealisasi hanya 22 dokumen atau 88%
- Faktor penyebab tidak memenuhi target : belum waktunya untuk melakukan pembayaran
 - Implikasi
 - perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD : tidak tercapaiannya target kinerja program
 - Kebijakan/tindakan faktor-faktor penyebab tersebut: penganggaran dan target disesuaikan waktu pencairan
- b) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Kegiatan Umum pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp.136.194.000 dan terealisasi Rp.135.250.921. dari taret kinerja 350 laporan yang terealisasi 34 laporan atau 9,7 %
- Faktor penyebab tidak memenuhi target : belum waktunya untuk melakukan pembayaran Jadwal tidak dapat ditentukan

- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD : tidak tercapaiannya target kinerja program
 - Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut: anggaran dan target kinerja disesuaikan dengan kebutuhan
- c) Program Penyelenggaraan Persandian Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (PPID) kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota pada Sub Kegiatan Pelaksanaan keamanan informasi Pemerintahan daerah kabupaten / kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dari rencana anggaran sebesar Rp. 7.398.000 yang terealisasi sebesar Rp.1.233.000 dari target kinerja 4 laporan yang terealisasi 1 laporan atau 25 %
- Faktor penyebab tidak memenuhi target belum waktunya untuk melakukan pembayaran
 - Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD : tidak tercapaiannya target kinerja program
 - Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut: anggaran dan target kinerja disesuaikan dengan kebutuhan
- d) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin dan mesin lainnya dari rencana anggaran sebesar Rp.19.709.000 dan terealisasi Rp.9.709.000 dari target kinerja 2 unit yang terealisasi 1 unit atau 50 %
- Faktor penyebab tidak memenuhi target : belum waktunya untuk melakukan pembayaran Jadwal tidak dapat ditentukan
 - Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD : tidak tercapaiannya target kinerja program
 - Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut: anggaran dan target kinerja disesuaikan dengan kebutuhan

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu

- a) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik kegiatan Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Layanan hubungan Media dari target kinerja 3 layanan dengan terealisasi hanya 3 Layanan atau 100 %
- b) Program pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Pusat dan Sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota pada sub kegiatan penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kab/ kota dari target 10 dokumen dan terealisasi 10 atau 100%
- c) Program pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Pusat dan Sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota pada sub kegiatan Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah dari target 50 unit dan terealisasi 50 unit atau 100%
- d) Program pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota pada sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dari target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%
- e) Program pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota pada sub kegiatan Pengelolaan Pusat data pemerintah daerah dari target 1 unit dan terealisasi 1 unit atau 100%

- f) Program pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota pada sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik dari target 5 unit dan terealisasi 5 unit atau 100%
- g) Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota kegiatan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah pada sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dari target 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen atau 100%
- h) Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota kegiatan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA –SKPD dari target 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau 100%
- i) Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota kegiatan Administrasi Keuangan pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan bulanan / triwulanan/ semesteran SKPD dari target 5 laporan dan terealisasi 5 Laporan atau 100%
- j) Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga dari target 4 paket dan terealisasi 4 paket atau 100%
- k) Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan dari target 4 paket dan terealisasi 4 paket atau 100%
- l) Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan dan peraturan perundang-undangan dari target 200 dokumen dan terealisasi 200 dokumen atau 100%

- m) Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan dari target 4 paket dan terealisasi 4 paket atau 100%
- n) Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota kegiatan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari target 4 laporan dan terealisasi 4 laporan atau 100%
- o) Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota kegiatan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari target 12 laporan dan terealisasi 12 laporan atau 100%
- p) Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota kegiatan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor dari target 12 laporan dan terealisasi 12 laporan atau 100%
- q) Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota kegiatan pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas dari target 15 unit dan terealisasi 15 unit atau 100%
- r) Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota kegiatan pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan , Peralatan dan perlengkapan kantor dari target 10 unit dan terealisasi 10 unit atau 100%
- s) Program penyelenggaraan statistik sektoral kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral lingkungan daerah kabupaten / kota pada sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan , pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dari target 5 dokumen dan terealisasi 5 dokumen atau 100%

- t) Program Penyelenggaraan Persandian Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (PPID) kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota pada Sub Kegiatan Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah dari target kinerja 1 dokumen yang terealisasi 1 dokumen atau 100 %
- u) Program Penyelenggaraan Persandian Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (PPID) kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota pada Sub Kegiatan Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota dari target kinerja 2 laporan yang terealisasi 2 laporan atau 100 %
- v) Program Penyelenggaraan Persandian Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (PPID) kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota pada Sub Kegiatan Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota dari target kinerja 29 perangkat daerah yang terealisasi 29 perangkat daerah atau 100 %
- w) Program Penyelenggaraan Persandian Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (PPID) kegiatan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten / kota pada Sub Kegiatan Operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten / kota dari target kinerja 29 perangkat daerah yang terealisasi 29 perangkat daerah atau 100 %

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu Program Informasi dan Komunikasi Publik pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota pada sub kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik telah melebihi target kinerja hasil / keluarannya yaitu dari target 480 dokumen realisasinya menjadi 593 dokumen sekitar 123,54 %.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika s/d tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel T-C29.

Tabel T-C29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Lembar

Kode Rekening						urusan /BidangUrusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan (Tahun 2021 + 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun Berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
										Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16			1		Program Komunikasi dan Informasi Publik	persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	181	480	593	1.24	100	874	8.74

2	16	2	1		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik yang telah dikelola	100	181	100	98	98%	100	498	4.98
2	16	2	2	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	480	685	480	593	123.5	480.0	1,758	5.0
2	16	2	2	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	25	8	25	22	88	25	1758	70.32
2	16	2	2	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3	6	3	3	100	3	12	4

2	16	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi perangkat daerah (OPD) Yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	152	100	100	100	100	352	3.52
2	16	3	2		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase domain dan sub domain yang dikelola	100	156	100	100	100%	100	356	3.56
2	16	3	2	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10	2	10	10	100	10	22	2.2
2	16	3	2	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	50	600	50	50	100%	50	700	14

2	16	3	2		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi informatika yang dikelola dan dikembangkan	100	199	100	100	100	100	399	3.99
2	16	3	2	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-	100	195	1	1	100%	1	197	1.97
						Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
2	16	3	2	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintahan Daerah yang dikelola	1	305	1	1	100%	1	307	307

2	16	3	2	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik yang dikembangkan	5	10	5	5	100%	5	20	4
2	20	3	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	200	100	100	100	100	400	4
2	20	2	2		Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota	persentase data statistik yang tersedia	100	200	100	100	100	100	400	4

2	20	2	2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah jenis buku statistik sektoral yang tersedia	5	10	5	5	100%	5	20	4
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (PROGRAM PPIPD)	Tingkat keamanan informasi pemerintah Daerah	100	200	100	100		100	400	4
2	21	2	2		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	persentase perangkat daerah yang menggunakan pengamanan persandian	300	300	100	100		100	400	103
2	21	2	2	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	1	6	1	1	100%	1	8	8

2	21	2	2	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten /kota	2	5	2	2	100%	2	9	6
2	21	2	2	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota Berbasis Elektronik	4	4	4	1	25	2	7	1.75
2	21	2	2	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	29	58	29	29	100%	29	116	4
2	21	2	2		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase yang telah menggunakan pola jaring komunikasi sandi	100	200	100	100	100%	100	400	4

2	21	2	2	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Perangkat yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	29	58	29	29	100%	29	116	4
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	191	100	19	19%	100	310	6
2	16	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja perangkat daerah	100	197	100	100	100%	100	397	3.97
2	16	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	8	4	4	100%	4	16	4
2	16	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	2	2	100%	2	6	3

2	16	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	194	100	98	98,45%	100	392	3.92
2	16	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	322	36	322	317	98,45%	322	675	2.10
2	16	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	10	5	5	100%	5	20	4
2	16	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	100	194	100	100	100%	100	394	3.94
2	16	1	2.1	3	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	111	4	4	100%	4	119	29.75

2	16	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	24	4	4	100%	4	32	800%
2	16	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	24	200	200	100%	12	236	19.67
2	16	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	151	350	34	9,71%	12	197	16.42
2	16	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	50	50%		50	

2	16	1	2.1	6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit perlatan dan mesin lainnya yang disediakan			2	1	50%		1	
2	16	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	200	100	100	100	100	400	4
2	16	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	477	4	4	100%	4	485	121.25
2	16	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	24	12	12	100%	12	48	4

2	16	1	2.1	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	24	12	12	100%	12	48	4
2	16	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	164	100	100	100%	100	364	3.64
2	16	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	30	15	15	100%	15	60	4

2	16	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	2	10	10	100	10	22	2.2
---	----	---	---	---	--	--	----	---	----	----	-----	----	----	-----

2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Indikator yang mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Persentase Penyebarluasan Informasi dan Kerjasama Media Massa dari terbitan berita melalui media tentang kegiatan pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang (baik cetak maupun elektronik) sehingga Dampak masyarakat mendapatkan informasi yang cepat, tepat dan akurat.

Indek SPBE

Penerapan TIK dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elekt, dan keselarasan ronik (SPBE) perlu evaluasi secara teratur dan terencana. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan risiko TIK , manfaat. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Sesuai PMPANRB 59/2020, penilaian indeks SPBE terdiri dari empat domain, delapan aspek, dan 47 indikator.

Indikator Persentase luas wilayah yang tercoverage jaringan internet

Indikator Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah memiliki

1. Kategori Sistem Elektronik

(Evaluasi tingkat atau kategori sistem elektronik yang digunakan)

2. Tata Kelola Keamanan Informasi;

(Evaluasi kesiapan bentuk tata kelola keamanan informasi beserta instansi/perusahaan/fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelola keamanan informasi)

3. Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi;

(Evaluasi kesiapan penerapan pengelolaan risiko keamanan informasi sebagai dasar penerapan strategi keamanan informasi.

4. Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi;

(Evaluasi kelengkapan dan kesiapan kerangka kerja (kebijakan & prosedur) pengelolaan keamanan informasi dan strategi penerapannya)

5. Pengelolaan Aset Informasi;

(Evaluasi kelengkapan pengamanan aset informasi, termasuk keseluruhan siklus penggunaan aset tersebut)

6. Teknologi dan Keamanan Informasi;

(Evaluasi kelengkapan, konsistensi dan efektifitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasi)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel T C30

TABEL T-C30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	INDIKATOR	SPM/STD NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD			Realisasi Capaian		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Urusan Komunikasi dan Informatika</i>										
	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)				2.5	2.8			2.5	2.8	
	persentase luas wilayah yang tercoverage jaringan internet				85.78	87.70			85.78	87.70	
	persentase penyebarluasan informasi dan kerjasama media yang dikelola				100.00	100.00			100.00	100.00	
	Predikat Nilai Sakip				CC	B			CC	B	
	Urusan Statistik										
	Persentase Data statistik yang dipublikasikan				100.00	100.00			100.00	100.00	

	persentase data statistik sektoral yang tersedia pada portal satu data daerah				75.00	85.00			75.00	85.00	
	Urusan Persandian										
	Persentase jumlah aset informasi daerah yang diamankan				50.00	60.00			50.00	60.00	
	jumlah insiden siber terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik				2.00	2.00			2.00	2.00	
	IKK Baru										
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			100	100	100			100	100	
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			100	85.78	87.70			85.78	87.70	
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			100	100.00	100.00			100.00	100.00	

	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			100	64	65	37,52	64	64	65	
	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah										
	Indikator Permendagri 86										
10.1	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan				100	100			100	100	
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi				80	80			80	80	
10.4	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet				81	87			81	87	
10.5	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi				50	56			50	56	
14.1	Tersedianya Sistem Data Dan Statistik Yang Terintegrasi				ada	ada			ada	ada	
14.2	Buku Kabupaten Dalam Angka				ada	ada			ada	ada	

14.3	Buku PDRB				ada	ada			ada	ada	
15.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah				100	100			100	100	
	Indikator Permendagri 18										
outcome	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Iternet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo				100	100	100	100	100	100	
1.1	Presentase Perangkat Daerah Yang Terkoneksi Di Jaringan Pemerintah Atau Menggunakan Akses Internet Yang Diamankan Yang Disdiakan Oleh Kominfo				100	100	100	100	100	100	
1.2	Presentase Perangkat Daerah Yang Terkoneksi Di Jaringan Pemerintah Atau Menggunakan Akses Internet Yang Diamankan Yang Disdiakan Oleh Kominfo				100	100	100	100	100	100	

1.3	Tersedianya Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah Yang Disediakan Dinas Kominfo (Berbasis Suara, Video, Teks, Data Dan Sinyal Lainnya) Dengan Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah				ada	ada			ada	ada	
outcome	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi				100	100	100	124	100	100	
3.1	Persentase Kegiatan (Event) Perangkat Daerah Dan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Yang Dimanfaatkan Secara Daring Dengan Memanfaatkan Domain Dan Subdomain Instansi Penyelenggaraan Negara Sesuai Dengan Pm Kominfo No 5/2015				100	100	81,4	tdk	100	100	
3.2	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Portal Dan Situs Web Yang Sesuai Standar				50	60	27,5	47	50	60	

3.3	Presentase Perangkat Daerah Yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum Dan Aplikasi Khusus Yang Ditetapkan Sesuai Peraturan Perundang Undangan				50	60	27,5	47	50	60	
3.4	Persentase Layanan Spbe (Layanan Publik Dan Layanan Administrasi Pemerintahan) Yang Tercantum Dalam Dokumen Bisnis Yang Telah Diimplementasikan Secara Elektronik				20	50	blm ada	100	20	50	
3.5	Persentase Layanan Spbe (Layanan Publik Dan Layanan Administrasi Pemerintahan) Yang Memanfaatkan Sertifikat Elektronik				50	60	blm ada	blm ada	50	60	
3.6	Persentase Sistem Elektronik Yang Terdaftar Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				100	100	100	100	100	100	

3.7	Persentase Layanan Publikdan Layanan Administrasi Yang Terintegrasi Dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah				100	100	100	100	100	100	
3.8	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Layanan Pusat Data Pemerintah				100	100	27,5	47	100	100	
3.9	Persentase Perangkat Daerah Yang Menyimpan Data Di Pusat Data Pemerintah				55	70	10	47	55	70	
3.10	Persentase Perangkat Daerah Yang Memperbaharui Datanya Sesuai Sikulus Jenis Data (Sesuai Renstra Kominfo)				55	70	10	47	55	70	
3.11	Persentase Data Yang Dapat Berbagi Pakai				30	50	blm ada	blm ada	30	50	
3.12	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengimplementasikan Inovasi Yang Mendukung Smart City				30	50	blm ada	blm ada	30	50	

3.13	Persentase Asn Pengelola Tik Yang Tersertifikasi Kompetensi Dibawah Pengelolaan Dinas Kominfo				100	100	50	100	100	100	
3.14	Tersedianya Peraturan Daerah Atau Peraturan Kepala Daerah Terkait Implementasi E Government				ada	ada	ada	ada	ada	ada	
outcome	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Priorotas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				70	70	91	66,29	70	70	
3.4	Persentase Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Kab/Kota Yang Menyebarkan Informasi Dan Kebijakan Pemerintah Dan Pemerintah Kab/Kota				50	50		100	50	50	
3.5	Persentase Konten Informasi Terkait Program Dan Kebijakan Pemerintah Dan Pemerintah Kabupaten / Kota Sesuai Dengan Strategi Komunitas (Strakom)				100	100	90	123	100	100	

3.6	Persentase Diseminasi Dan Layanan Informasi Publik Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Strategi Komunikasi (Strakom) Dan Sop Yang Telah Ditetapkan						tdk ada	tdk ada			
outcome	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah				100	100	100	100	100	100	
outcome	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah				tidak ada	tidak ada	0	100	tidak ada	tidak ada	
1.1	Tersedianya Buku Profil Daerah				Ada	Ada	ada	ada	Ada	Ada	
1.2	Jumlah Survei Statistik Sektoral Yang Dilakukan				tidak ada	tidak ada	100	100	tidak ada	tidak ada	
1.3	Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral Yang Dilakukan				tidak ada	tidak ada	tdk ada	tdk ada	tidak ada	tidak ada	
1.4	Jumlah Survei Statistik Sektoral Yang Mendapat Rekomendasi BPS				tidak ada	tidak ada	tdk ada	tdk ada	tidak ada	tidak ada	

1.5	Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral Yang Mendapat Rekomendasi Dari BPS				tidak ada	tidak ada	tdk ada	tdk ada	tidak ada	tidak ada	
1.6	Persentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik				tidak ada	tidak ada	tdk ada	tdk ada	tidak ada	tidak ada	
1.7	Persentase Kelengkapan Metadata Variabel Dari Kegiatan Statistik				tidak ada	tidak ada	tdk ada	tdk ada	tidak ada	tidak ada	
outcome	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah				64	65	37,52	58,19	64	65	
1.1.	Persentase Kegiatan Strategis Yang Telah Diamankan Melalui Kegiatan Pengamanan Sinyal Dibanding Banyaknya Jumlah Kegiatan Strategis Yang Harus Diamankan				100	100	tdk ada	tdk ada	100	100	
1.2	Presentase Kegiatan Strategis Yang Telah Diamanakan Melalui Kegiatan pengamanan Sinyal Dibanding Banyaknya Jumlah Kegiatan Strategis Yang Harus Diamankan				100	100	tdk ada	tdk ada	100	100	

1.3	Persentase Sistem Elektronik Yang Telah Menerapkan Prinsip Sistem Manajemen Yang Telah Menerapkan Prinsip2 Manajemen Keamanan Informasi (Smki) Dan Atau Aplikasi Persandian Dibanding Jumlah Sistem Elektronik Yang Ada Pada Pemerintah Daerah				50	60	tdk ada	tdk ada	50	60	
1.4	Presentase System Elektronik/Asset Informasi Yang Telah Di Audit Dengan Resiko Kategori Rendah				50	70	tdk ada	tdk ada	50	70	
1.5	Presentase Titik Yang Diamankan Dibanding Dengan Jumlah Seluruh Titik Pada Pemerintahan Daerah Berdasarkan Polahubungan Komunikasi Sandi (Phks) Yang Ditetapkan				100	100	tdk ada	tdk ada	100	100	

3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Tingkat Pelayanan Kinerja OPD

Secara umum kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang sudah menunjukkan hasil yang optimal, baik dari pencapaian sasaran kinerja RPJMD. Namun demikian, masih terdapat isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang terkait kinerja pelayanan Perangkat Daerah yaitu :

- a. Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. Penguatan Keterbukaan Informasi
- c. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- d. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik;
- e. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah persandian;
- f. Perkembangan Teknologi Informasi;
- g. Program satu data Indonesia

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyelenggaraan Tugas dan fungsinya yaitu :

Urusan komunikasi dan Informatika

- Belum tersosialisasikannya ke Masyarakat Layanan Aduan Seperti SPAN Lapor, Baruga dan SIAPP
- Amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
- Kurang Optimalnya Produksi Informasi Pemerintah berupa berita dan Video sinematik
- Perkominfo No.8/PER/M.Kominfo/6/2010 Tentang Pedoman pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
- Belum terbentuknya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)

- Belum optimalnya pelayanan media komunikasi publik (Media Cetak, Online dan Elektronik)
- Infrastruktur Jaringan TIK belum lengkap
- Bandwidth Internet belum mencukupi kebutuhan pemerintah
- Kurangnya Fasilitas pusat data (Server)
- Aplikasi yang digunakan belum terintegrasi dengan aplikasi pemerintah pusat
- Belum adanya rencana induk / master plan TIK / arsitektur SPBE
- Kurangnya SDM bidang TIK

Urusan Statistik

- Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dibidang statistik
- Kurangnya infrastruktur penyelenggaraan statistik

Urusan Persandian

- Kurangnya sosialisasi tata cara penggunaan sertifikat elektronik
- Kurangnya penggunaan Sistem Informasi yang terintegrasi dengan Sistem Sertifikasi Elektronik dari BsrE
- Jumlah pengguna atau pegawai yang memiliki akun sertifikasi digital masih rendah
- Belum terpusatnya pengelolaan aplikasi yang dimiliki oleh masing-masing OPD
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki skill baik di bidang teknologi informasi maupun keamanan informasi
- Rendahnya jumlah SDM yang memiliki latar belakang Pendidikan Teknologi Informasi (TI)

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program / internasional ,seperti NSPK, SPM dan SDGS (Sustainable Development Goals) ;

Dampak yang ditimbulkan dari adanya isu-isu startegis urusan komunikasi dan informatika yaitu kurang maksimalnya pelayanan pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik, baik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintah melalui implemtasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) maupun dalam menciptakan

kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Selain itu infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika yang belum maksimal dan merata di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang berdampak pada penggunaan TIK tidak maksimal dalam penyediaan kebijakan tata kelola dan pelaksanaan Satu Data Indonesia.

4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam upaya meningkat kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD :

a) Tantangan

- Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat cepat
- Pembangunan infrastruktur TIK utama jaringan intra pemerintah daerah belum menjangkau kantor Pemerintah di wilayah desa / kelurahan.
- Tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya keterbukaan informasi dan pelayanan prima memacu Dinas komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat.
- Sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang belum memadai karena belum adanya tenaga teknis yang benar-benar mendalami pendidikan formal tentang teknologi informasi dan komunikasi.
- Anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana bidang komunikasi dan informatika dalam menunjang kegiatan pelayanan bagi masyarakat masih relatif rendah dan belum memadai . Hal ini disebabkan karena masih adanya asumsi bahwa pembangunan

komunikasi dan informatika tidak secara langsung memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD

b) Peluang

- Dinas komunikasi dan informatika sebagai instansi vital memainkan peranan penting dalam misi ke 5 Bupati Sidenreng Rappang lima tahun ke depan.
- Pembangunan infrastruktur TIK sesuai perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai aturan yang ada, keterbukaan informasi dan standar pelajaran minimal Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Pendidikan dan pelatihan bagi operator dinas komunikasi dan Informatika serta pengajuan permohonan untuk formasi tenaga teknis dibidang komunikasi dan informatika kepada Badan Kepegawaian Daerah.
- Mengefektifkan tenaga-tenaga Dinas Komunikasi dan Informatika

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Dari penyebaran isu-isu diatas direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Perlu mengikut sertakan PNS untuk mengikuti pendidikan formal dan pelatihan bidang teknologi komunikasi dan formatika
- b) Perlu untuk meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana TIK yang dimiliki Kabupaten Sidenreng Rappang
- c) Perlu menyusun kebijakan tata kelola SPBE
- d) Perlu meningkatkan volumen kegiatan PPID Pembantu agar semakin aktif.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capainnya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika

Kabupaten Sidenreng Rappang, di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program ,kegiatan, sub kegiatan , serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari 5 Program, 11 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Berdasarkan tabel T-C. 31 maka hasil review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil analisis kebutuhan RKPD tahun 2025 dari rancangan awal dengan total kebutuhan anggaran Rp. 2.442.458.451,-

B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Hasil analisis kebutuhan RKPD tahun 2025 dari rancangan awal dengan total kebutuhan anggaran Rp. 515.356.000,-

C. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Hasil analisis kebutuhan RKPD tahun 2025 dari rancangan awal dengan total kebutuhan anggaran Rp.2.359.516.000 -

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial Hasil analisis kebutuhan RKPD tahun 2025 dari rancangan awal dengan total kebutuhan anggaran Rp. 63.492.000,-

E. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Hasil analisis kebutuhan RKPD tahun 2025 dari rancangan awal dengan total kebutuhan anggaran Rp. 58.591.000,-

Penjabaran dari rancangan awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat ditabel T-C31.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Lembar1 Dari 6

	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGE T CAPAI AN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TA RGE T CAP AI AN	Kebutu han Dana (Rp.000)	CATA TAN PENT ING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,780,678, 360	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,643,17 8,360	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan, penganggaran , dan capaian kinerja perangkat daerah	100	10,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja perangkat daerah	100	10,000,0 00	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4 Dokumen	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pangkajene Sidenreng	jumlah dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pangkajene Sidenreng	jumlah dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2,360,494,360	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2,360,494,360	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	322 Orang/bulan	2,357,494,360	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24/12 Orang/bulan	2,357,494,360	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	3,000,000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	100	174,144,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	100	63,144,000	
	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2,500,000	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	500,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	3,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	200 Dokumen	13,644,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	200 Dokumen	13,644,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	155,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	48,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	Cakupan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00	167,980,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	Cakupan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00	144,500,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 laporan	2,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 laporan	1,500,000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	78,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	78,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	87,480,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	65,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	68,060,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	65,040,000.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	59,060,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	56,040,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	9,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	9,000,000	
1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		persentase layanan publik yang diselenggarakan		497,356,000	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		persentase layanan publik yang diselenggarakan	100	515,356,000	

			an secara online dan terintegrasi	100				secara online dan terintegrasi			
	Relasi Media	Pangkajene Sidenreng	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. terverifikasi dewan pers, dan 2 . Terdaftar di Dinas kominfo dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	3 Lapora n	290,000,000	Relasi Media	Pangkaj ene Sidenre ng	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. terverifikasi dewan pers, dan 2 . Terdaftar di Dinas kominfo dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	3 Lap ora n	290,000,000	
	Pelayanan Informasi Publik	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Permohonan publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan	25 permo honan	82,129,000	Pelayanan Informasi Publik	Pangkaj ene Sidenre ng	Jumlah Permohonan publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan	25 per mo hon an	72,129,000	
	Penyusunan Konten	Pangkajene Sidenreng	Jumlah konten Informasi Publik	480 konten	125,227,000	Penyusunan Konten	Pangkaj ene Sidenre ng	Jumlah konten Informasi Publik	480 kon ten	153,227,000	
2	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Organisasi perangkat daerah (OPD) Yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	1,863,937,000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase Organisasi perangkat daerah (OPD) Yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	2,359,516,000	

	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	Persentase domain dan sub domain yang dikelola	100	22,009,000	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	Persentase domain dan sub domain yang dikelola	100	2,009,000	
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	10 dokumen	22,009,000	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	10 dokumen	2,009,000	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	Persentase aplikasi informatika yang dikelola dan dikembangkan	100	1,841,928,000	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	Persentase aplikasi informatika yang dikelola dan dikembangkan	100	2,357,507,000	
	Fasilitas Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Pangkajene Sidenreng	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	63,719,000	Fasilitas Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Pangkajene Sidenreng	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	13,719,000	

	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Pangkajene Sidenreng	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	23,116,000	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Pangkajene Sidenreng	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	3,116,000	
	Pembangunan dan / atau Pengembangan Aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Pangkajene Sidenreng	jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasisi elektronik yang dikembangkan	5 Aplikasi	337,331,000	Pembangunan dan / atau Pengembangan Aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Pangkajene Sidenreng	jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasisi elektronik yang dikembangkan	5 Aplikasi	337,331,000	
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah Kab / Kota yang terhubung dengan jaringan intra Pemerintah Daerah Kab/ kota	40 Perangkat Daerah	1,417,762,000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah Kab / Kota yang terhubung dengan jaringan intra Pemerintah Daerah Kab/ kota	40 Perangkat Daerah	2,003,341,000	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Pangkajene Sidenreng	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100.00	63,492,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Pangkajene Sidenreng	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100.00	63,492,000	

	peningkatan peran statistik sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Pangkajene Sidenreng	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan dan / atau penyusunan kebijakan	100.00	13,492,000	peningkatan peran statistik sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Pangkajene Sidenreng	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan dan / atau penyusunan kebijakan	1.00	13,492,000	
	Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia	Pangkajene Sidenreng	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metada	5 dokumen	50,000,000	Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia	Pangkajene Sidenreng	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metada	5 dokumen	50,000,000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (PROGRAM PPIPD)	Pangkajene Sidenreng	Tingkat keamanan informasi pemerintah Daerah	65	80,091,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (PROGRAM PPIPD)	Pangkajene Sidenreng	Tingkat keamanan informasi pemerintah Daerah	65	58,591,000	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Pangkajene Sidenreng	persentase perangkat daerah yang menggunakan pengamanan persandian	100	19,859,000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Pangkajene Sidenreng	persentase perangkat daerah yang menggunakan pengamanan persandian	100	9,359,000	

	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	1 dokumen	5,000,000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	1 dokumen	2,500,000	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi	2 laporan	4,601,000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah	2 laporan	1,601,000	

			pemerintah daerah kabupaten /kota					daerah kabupaten /kota			
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pangkajene Sidenreng	jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota Berbasis Elektronik	4 laporan	6,233,000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pangkajene Sidenreng	jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota Berbasis Elektronik	4 laporan	1,233,000	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	29 perangkat daerah	4,025,000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	29 perangkat daerah	4,025,000	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	Persentase yang telah menggunakan pola jaringan komunikasi sandi	100	60,232,000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	Persentase yang telah menggunakan pola jaringan komunikasi sandi	100	49,232,000	

	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	jumlah Perangkat yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi	29 opd	60,232,000	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	jumlah Perangkat yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi	29 opd	49,232,000	
Jumlah					5,285,554,360						5,640,133,360

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Proses perencanaan atau planning adalah bagian dari kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (decision making) untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu proses atau perencanaan yang sering dilakukan dalam melakukan pembangunan adalah dengan menggunakan sistem pembangunan yang bersifat Bottom-Up. Bottom-Up Planning adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Dalam hal ini atasan merupakan pemerintah dan bawahan merupakan masyarakat, swasta serta pemangku kepentingan. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat ini belum ada jaring aspirasi DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Dalam hal ini belum ada usulan aspirasi masyarakat yang ikut berperan serta dalam Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang diwakilkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang.

TABEL T-C 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.1 Telaahan terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika Nasional

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kemenkominfo berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan GotongRoyong.” Seperti halnya visi, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, misi Menteri/Pimpinan Lembaga wajib mengacu pada misi Presiden dan Wakil Presiden.

Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik. Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital;

3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik. Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut:
- Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
 - Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
 - Meningkatnya konektivitas layanan pos;
 - Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
 - Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
 - Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
 - Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
 - Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
 - Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam rangka mencapai visi dan misi, BSSN berupaya memetakan visi dan misi tersebut dalam tujuan yang selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan strategi BSSN pada periode tahun 2020–2024. Tujuan BSSN tahun 2020–2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN Dalam rangka

Mendukung pencapaian 2 (dua) tujuan sebagaimana disebutkan diatas,

BSSN telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BSSN dalam kurun waktu 2020-2024. Adapun Sasaran Strategis BSSN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia
2. terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima
3. terwujudnya birokrasi BSSN yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam agenda pembangunan penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan Tahun 2020-2024 diarahkan pada pemantapan stabilitas keamanan nasional untuk mewujudkan rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, serta keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Arah kebijakan dan strategi nasional untuk mengatasi isu-isu strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di ruang siber adalah penguatan keamanan dan ketahanan siber yang diwujudkan dengan strategi berikut :

1. penguatan pengamanan infrastruktur siber
2. pembangunan dan penguatan computer emergency response team
3. pencegahan kejahatan siber dan peningkatan kerjasama internasional bidang siber
4. penguatan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber
5. penyelesaian kejahatan siber clearance rate tindak pidana siber.

Arah kebijakan di atas diperkuat dengan adanya proyek prioritas strategis penguatan ketahanan dan keamanan siber. Proyek prioritas strategis ini dimaksudkan sebagai penajaman proyek-proyek prioritas yang dianggap memiliki nilai strategis dan daya ungkit dalam mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional di bidang keamanan nasional.

Arahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2024 akan melanjutkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional untuk memantapkan pemulihan ekonomi dan system kesehatan menuju transformasi ekonomi yang inklusif. Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2024 adalah “Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”. RKP tahun 2024 mencakup 7 (tujuh) prioritas nasional yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;

6. Ekonomi hijau;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Arah Kebijakan Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika Arah kebijakan umum nasional bidang komunikasi dan informatika sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

- Tujuan Strategis
 1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
 2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
 3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.
- Sasaran Strategis
 1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
 2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
 3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
 4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
 5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
 6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
 7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
 8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
 9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Badan Pusat Statistik

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional

Maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju. Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang Ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme

Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan

3.3.1 Isu Strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kelembagaan Diskominfo yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Dinas Kominformasi-SP, untuk capaian kinerja yang optimal dipandang perlu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kesamaan pemahaman dan interpretasi terhadap berbagai produk peraturan perundang- undangan bidang komunikasi dan informatika khususnya terkait dengan penyelenggaraan urusan daerah dibutuhkan untuk mempercepat terwujudnya pembangunan bidang komunikasi dan informatika di daerah Tersedianya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan kapasitas khususnya di bidang komunikasi

3. Rendahnya anggaran yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan urusan komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Hasil Telaahan terhadap Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dimaksudkan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Propinsi Sulawesi Selatan dalam pencapaian indikator kinerja yang tertuang dalam sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.

3.3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan gambaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tiga tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan visi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tiga tahun kedepan sebagaimana yang tertuang dalam rencana pembangunan Daerah 2024-2026

Melalui visi tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran produksi, pengelolaan hasil dan pemasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kehidupan sosial ekonominya.

III.2.1 Tujuan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Prioritas Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk menjadikan acuan perencanaan program dan kegiatan tahun 2024, maka rencana kerja yang dimaksud adalah :

- Meningkatkan Akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan komunikasi publik
- Meningkatkan kualitas pelayanan Data Statistik
- Meningkatkan kualitas ketersediaan dan keamanan informasi

Indikator Tujuan

- Indeks SPBE
- Persentase Data Statistik yang dipublikasikan
- Persentase jumlah aset informasi daerah yang diamankan

III.2.2 Sasaran

Adapun sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 adalah untuk terwujudnya :

- Meningkatnya Penyebarluasan informasi dan kerjasama media massa
- Meningkatnya jangkauan infrastruktur jaringan internet
- Tersedianya Data Statistik Sektorial dalam portal satu data daerah
- Meningkatnya pengamanan sistem Pemeintah Berbasis Elektronik (SPBE)
- Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan

III.2.3 Indikator Sasaran

- Persentase penyebaran informasi dan kerjasama media yang dikelola
- Persentase luas wilayah yang tercoverange dengan jaringan internet
- persentase data statistik sektoral yang tersedia pada portal satu data daerah
- jumlah insiden siber terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
- Nilai SAKIP Perangkat Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan gambaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu Tiga tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan visi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Tiga tahun kedepan sebagaimana yang tertuang dalam rencana pembangunan Daerah (RPD)2024-2026

Melalui visi tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran produksi, pengelolaan hasil dan pemasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kehidupan sosial ekonominya.

IV. Program dan Kegiatan

Faktor utama disusunnya program/kegiatan dalam renja ini adalah demi pencapaian visi misi RPD Tahun 2024-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu faktor penunjang lainnya pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan wujud nyata pengimplementasian tupoksi SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun program-program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 terdiri dari :

I. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan informasi, penyediaan, pengumpulan informasi dan pendokumentasian, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah di Kab.Sidrap, yang merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi & pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sub Kegiatannya adalah

1. Penyusunan Konten
2. Pelayanan informasi publik
3. Relasi media

II. Program Aplikasi Informatika

Program ini dimaksudkan untuk menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta meningkatkan pengelolaan aplikasi dalam menunjang system pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) bagi pemerintah daerah. Adapun kegiatan yang terkait program ini adalah :

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatannya adalah

- Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Fasilitas Penyelenggaraan SPBE di Lingkup pemda
- Penyelenggaraan Pusat kemdali Pemerintah Daerah
- Pembangunan dan / atau Pengembangan Aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
- Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/ KotaProgram

III. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini dimaksudkan untuk menyediakan data informasi statistik sektoral sebagai bahan / dokumen dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan instansi pemerintah daerah. Adapun Kegiatan Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota yang terkait program ini adalah:

- Peningkatan peran statistik sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
- Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia

IV. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi

Pemerintah Daerah (PPIP)

Program ini dimaksudkan untuk Mengoptimalkan Fungsi Pemerintah Daerah guna mempromosikan potensi daerah serta meningkatkan pelayanan informasi dan untuk menciptakan tertib administrasi kearsipan persandian, arsip yang teratur, aman dan juga sebagai sarana pengiriman berita yang lebih cepat dan efisien dan aman dengan kegiatan antara lain :

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / kota

Sub Kegiatannya adalah

- Penetapan kebijakan Tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan Pengelohan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- Pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah
Sub Kegiatan yaitu

- Operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Adapun program penunjang urusan

- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan yaitu

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yaitu

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan / Triwulan /Semesteran SKPD

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah

- PenataUsahaan Barang Milik Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatannya adalah :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah

Sub Kegiatannya yaitu

- Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DInas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel T-C33

TABEL T-C33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan informatika

lembar1 dari 6

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
	1					2	4	8		11	14			17
	2					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
						Komunikasi dan Informatika				5,285,554,360				5,488,807,586
I	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	100	2,780,678,360	APBD II		100	2,487,702,586

	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja perangkat daerah	Pangkajene Sidenreng		100	10,000,000	APBD II		100	7,500,000
	2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	4 dokumen		5,000,000	APBD II		4 dokumen	3,000,000
	2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pangkajene Sidenreng	2 dokumen		5,000,000	APBD II		2 dokumen	4,500,000
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng		100	2,360,494,360	APBD II		100	2,173,468,586
	2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkajene Sidenreng	322 org/ bulan		2,357,494,360	APBD II		322 org/ bulan	2,169,468,586
	2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pangkajene Sidenreng	5 Laporan		3,000,000	APBD II		5 laporan	4,000,000
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Pangkajene Sidenreng		100	174,144,000	APBD II		100	93,644,000
	2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pangkajene Sidenreng	4 paket		2,500,000	APBD II		4 paket	1,000,000
	2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pangkajene Sidenreng	4 paket		3,000,000	APBD II		4 paket	1,000,000

	2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pangkajene Sidenreng	12 dokumen	13,644,000	APBD II		12 dokumen	13,644,000
	2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pangkajene Sidenreng	12 laporan	155,000,000	APBD II		12 laporan	78,000,000
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pangkajene Sidenreng	100.00	167,980,000	APBD II		100.00	148,000,000
	2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkajene Sidenreng	4 laporan	2,500,000	APBD II		4 laporan	2,000,000
	2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pangkajene Sidenreng	12 Laporan	78,000,000	APBD II		12 Laporan	79,000,000
	2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pangkajene Sidenreng	12 Laporan	87,480,000	APBD II		12 Laporan	67,000,000
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	100.00	68,060,000	APBD II		100.00	65,090,000
	2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pangkajene Sidenreng	15 unit	59,060,000	APBD II		15 unit	56,090,000
	2	16	01	2.03	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pangkajene Sidenreng	10 unit	9,000,000	APBD II		10 unit	9,000,000

II	2	16		1		Program Komunikasi dan Informasi Publik	persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Pangkajene Sidenreng	100	497,356,000	APBD II		100	516,356,000
	2	16	02	01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik yang telah dikelola	Pangkajene Sidenreng	100	497,356,000	APBD II		100	516,356,000
	2	16	02	2.01	14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. terverifikasi dewan pers, dan 2 . Terdaftar di Dinas kominfo dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Pangkajene Sidenreng	3 Laporan	290,000,000	APBD II		3 Laporan	290,000,000
	2	16	02	2.01	17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan	Pangkajene Sidenreng	25 permohonan	82,129,000	APBD II		25 permohonan	72,129,000
	2	16	02	2.01	23	Penyusunan Konten	Jumlah konten Informasi Publik	Pangkajene Sidenreng	480 konten	125,227,000	APBD II		480 konten	154,227,000
III	2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi perangkat daerah (OPD) Yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	100.00	1,863,937,000	APBD II		100	2,362,516,000
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup	Persentase domain dan sub domain yang dikelola	Pangkajene Sidenreng	100	22,009,000	APBD II		100	2,009,000

						Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	2	16	03	2.01	02	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Pangkajene Sidenreng	10 Dokumen	22,009,000	APBD II		10 Dokumen	2,009,000
	2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi informatika yang dikelola dan dikembangkan	Pangkajene Sidenreng	100	1,841,928,000	APBD II		100	2,360,507,000
	2	16	03	2.02	15	Fasilitas Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Pangkajene Sidenreng	1 laporan	63,719,000	APBD II		1 laporan	13,719,000
	2	16	03	2.02	16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Pangkajene Sidenreng	1 dokumen	23,116,000	APBD II		1 dokumen	3,116,000
	2	16	03	2.02	20	Pembangunan dan / atau Pengembangan Aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik yang dikembangkan	Pangkajene Sidenreng	5 aplikasi	337,331,000	APBD II		5 aplikasi	337,331,000
	2	16	03	2.02	24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah Kab / Kota yang terhubung dengan jaringan intra Pemerintah Daerah Kab/ kota	Pangkajene Sidenreng	40 perangkat Daerah	1,417,762,000	APBD II		40 perangkat Daerah	2,006,341,000

IV	2	20	03	2.01		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Pangkajene Sidenreng	100.00	63,492,000	APBD II		100.00	63,492,000
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota	persentase data statistik yang tersedia	Pangkajene Sidenreng	100%	63,492,000	APBD II		100%	63,492,000
	2	20	02	2.01	08	Peningkatan peran statistik sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan dan / atau penyusunan kebijakan	Pangkajene Sidenreng	100 persen	50,000,000	APBD II		100 persen	13,492,000
	2	20	02	2.01	10	Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dिलengkapi metada	Pangkajene Sidenreng	5 dokumen	13,492,000	APBD II		5 dokumen	50,000,000
V	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (PROGRAM PPIP)	Tingkat keamanan informasi pemerintah Daerah	Pangkajene Sidenreng	100.00	80,091,000	APBD II		100.00	58,741,000
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	persentase perangkat daerah yang menggunakan pengamanan persandian	Pangkajene Sidenreng	100	19,859,000	APBD II		100	9,509,000

	2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	Pangkajene Sidenreng	1 dokumen	5,000,000	APBD II		1 dokumen	2,650,000
	2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten /kota	Pangkajene Sidenreng	2 laporan	4,601,000	APBD II		2 laporan	1,601,000
	2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota Berbasis Elektronik	Pangkajene Sidenreng	4 Laporan	6,233,000	APBD II		4 Laporan	1,233,000
	2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	Pangkajene Sidenreng	29 perangkat daerah	4,025,000	APBD II		29 perangkat daerah	4,025,000
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase yang telah menggunakan pola jaring komunikasi sandi	Pangkajene Sidenreng	62.00	60,232,000	APBD II		62.00	49,232,000

	2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Perangkat yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi	Pangkajene Sidenreng	29 perangkat daerah	60,232,000	APBD II		29 perangkat daerah	49,232,000
Jumlah										5,285,554,360				5,488,807,586

BAB V

PENUTUP

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dalam pencapaian dan Peningkatan kualitas kinerja merencanakan 5 (Lima) program dan sebanyak 11 (Sebelas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub Kegiatan untuk mendukung Program Pemerintah Daerah dalam hal Meningkatkan Akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan komunikasi publik , Meningkatkan kualitas pelayanan Data Statistik Meningkatkan kualitas ketersediaan dan keamanan informasi dalam tujuan tersebut dijabarkan dalam bentuk pelaksanaan program kegiatan untuk Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Penjabaran kebijakan Pemerintah guna mengoperasionalkan ke tingkat pelaksanaan, menuntut kita menyusun rencana kerja dalam bentuk program dan kegiatan. Sehingga nantinya pencapaian tujuan dapat terwujud. Namun dalam menjalankan program / kegiatan tersebut tidak terlepas dari hambatan dan tantangan. Untuk itu dibutuhkan kebijakan untuk tetap berpijak pada tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai jembatan informasi ke Masyarakat

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 SKPD pada Dinas Komunikasi dan Informatika ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai pedoman bersama dalam menjalankan tugas kedinasan serta pedoman dalam penyusunan RKA Tahun 2025, yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.

Rencana Kerja SKPD harus tetap dijaga konsistensinya sesuai Tupoksi dinas melalui proses perencanaan pembangunan dan penganggaran setiap tahunnya. Demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk sungguh-sungguh memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam program serta kegiatan SKPDnya yang akan dicapai dalam 3 Tahun ke depan sesuai waktu RPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024 - 2026. Dengan cara menyusun program/kegiatan yang terdapat dalam renja, mengevaluasi Renstra dan Renja yang telah berjalan serta mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan. Upaya ini diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan daerah dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh semua lapisan masyarakat. Terima kasih.

Pangakajene Sidenreng, 21 April 2024

Kepala Dinas,



H. DACHTIAR, Shi.M.Si

Pangkat Pembina Tk I

Nip. 19710122 199203 1 003